

Abstrak

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH MELALUI TUKAR GULING DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI KOTA MALANG - JAWA TIMUR

Sehubungan dengan telah dikembangkannya fungsi Sekolah Pertanian Pembangunan/Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPP/SPMA) dan Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) Malang menjadi Diklat Ahli Penyuluhan Pertanian (Diklat APP) Malang dan mengingat lokasi yang letaknya berada di tengah kota dan kondisi kedua sekolah pada saat ini tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai tempat belajar mengajar maka pihak APP bermaksud untuk memindahkan kedua sekolah tersebut untuk dipertukarkan dengan bangunan Diklat APP yang baru dan memenuhi persyaratan sebagai kegiatan belajar mengajar, serta dapat menunjang kelestarian lingkungan.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dan pelaksanaan perolehan tanah instansi pemerintah dengan cara tukar guling oleh PT. DPUL untuk pembangunan perumahan di Kota Malang dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tukar guling apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau merasa dirugikan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perjanjian Tukar Menukar antara PT. Duta Perkasa Unggul Lestari (DPUL) dengan Departemen Pertanian telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *jis* Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Hambatan yang timbul adalah adanya tanah yang tetap menjadi asset Departemen Pertanian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tukar guling tersebut adalah dengan meminta kembali lahan tersebut kepada pihak Departemen Pertanian.

Kata kunci : Perolehan Hak Atas Tanah, Tukar Menukar, Pembangunan Perumahan,

Abstract

THE ACQUISITION OF GOVERNMENT INSTITUTION LANG TROUGHT SWAP IN HOUSING DEVELOPMENT BY PT. DUTA PERKASA UNGGUL LESTARI, MALANG CITY – EAST JAVA

In relation with the development of the School of Development Farming / the Farming High School (SPP/SPMA) and the Husbandry High School (SNAKMA) Malang to be The Training Center for Agricultural Extension Agent (Dildat APP) Malang and concerning the location in the city center and the condition of both schools recently, which do not meet the requirement as the teaching and learning place, so the party of APP intended to relocate the both schools to be exchanged with the new building of Dikiat APP and meet the requirement as the place for teaching and learning activities and can support the environmental conservation.

The aims of the research are to recognize the legal stipulations and the implementation of government's land acquisition through swap by PT. DPUL for housing development in Malang City, and the obstructions emerged in the implementation and the efforts to do in the implementation of swap when one of the parties does not meet the obligation or feel injured.

This research applied the method of empirical-juridical approach. The data used was secondary data. The data analysis used was normative analysis; the data collected was set forth in the form of logical and systematic description. Then, it was analyzed to get the information on the problem solving. Finally, the conclusion was made deductively.

The research results show that the exchange agreement between PT. Duta Perkasa Unggul Lestari (DPUL) and The Ministry of Agriculture is in accordance with Act number 17, 2003 on State Finance Jo Act number 25, 2004 on National Development Planning System jis the Regulation of Finance Minister number 96/PMK.06/2007 dated 4 September 2007 on the Procedure of Implementation, Utilization, Using, Disposal, and Alienation of State Assets. The obstructions emerged were the lands that remained the asset of the Ministry of Agriculture. The efforts to do to settle the obstructions emerged in the implementation of swap were by asking the lands back from the Ministry of Agriculture.

Keywords: Land Acquisition, Exchange, Housing Development